ISSN 1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

LIPI

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.2, Desember 2018

KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi "Nano-Nano" Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001

Jurnal
Penelitian Politik

LIPI

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris *(Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi)*
Prof. Dr. Indria Samego *(Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan)*
Dr. C.P.F Luhulima *(Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa)*
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA *(Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal)*
Dr. Lili Romli *(Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian)*
Drs. Hamdan Basyar, M.Si *(Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam)*
Dr. Sri Nuryanti, MA *(Ahli Kepartaian dan Pemilu)*
Dr. Ganewati Wuryandari, MA *(Ahli Kajian Hubungan Internasional)*
DR. Yon Machmudi, M.A *(Ahli Studi Islam dan Timur Tengah)*
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si *(Ahli kepemiluan dan kepartaian)*
Ratna Shofi Inayati, MBA *(ASEAN dan politik luar negeri)*

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D *(Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian)*
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc *(Ahli Kajian Hubungan Internasional)*
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si *(Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian)*
Dra. Sri Yanuarti *(Ahli Kajian Konflik dan Keamanan)*
Drs. Heru Cahyono *(Ahli Kajian Politik Lokal)*

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA *(Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan)*
Indriana Kartini, MA *(Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik)*

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Penelitian

Politik

Vol. 15, No. 2, Desember 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Catatan Redaksi iii

Artikel

- **Koalisi "Nano-Nano" Pilkada Serentak 2018**
  Moch. Nurhasim 129–142
- **Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal**
  Lili Romli 143–160
- **Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017**
  Agus Sutisna dan Idil Akbar 161–178
- **Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)**
  Firman Noor 179–196
- **Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019**
  Ridho Imawan Hanafi 197–213
- **Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi**
  Sri Budi Eko Wardani 215–231
- **Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia**
  Sri Yanuarti 233–248
- ***Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018**
  M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri 249–265

Resume Penelitian

- **Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung**
  Kurniawati Hastuti Dewi, dkk 267–288
- **Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi**
  Aisah Putri Budiatri, dkk 289–306

Review Buku

- **Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik**
  Mouliza K.D Sweinstani 307–317

Tentang Penulis 319–320

Pedoman Penulisan 321–325

CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul "Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018" yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religus dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupat--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli," Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal", memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan "mahar politik" yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul "Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017" membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni "Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018" ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarakan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang "Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019" yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel "Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi" yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul "Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia" membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terkahir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul "Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018" membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, "Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung". Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, "Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi", ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, "Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik". *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

PILKADA, PERAN PARTAI POLITIK, DAN KONSTELASI PRAGMATIS: KAJIAN ATAS PILGUB BANTEN, DKI JAKARTA, JATENG DAN JATIM (2017-2018)

LOCAL ELECTION, POLITICAL PARTIES' ROLES AND PRAGMATIC CONSTELATION: THE STUDY ON BANTEN, DKI JAKARTA, CENTRAL JAVA, AND EAST JAVA GOVERNOR ELECTION (2017-2018)

Firman Noor

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: firman.noor@yahoo.co.id

Diterima: 24 September 2018; Direvisi: 8 Oktober 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

Abstract

Political parties have found the momentum to involve in the political process including in the contestation in public positions. This paper discusses several phenomena which indicate the existence of negative conditions from the existence of political parties related to the local elections. This phenomenon is the absence of regional leaders who are party leaders in the area, strong role of non-party networks in political contestation, the dominance of pragmatism in determining coalitions that often exclude party idealism or ideology which shows the party's vulnerability in Indonesia. This paper shows the things that cause it. In addition, this paper offers several solutions so that various weaknesses can be overcome and at the same time it is expected to improve the quality of the elections in the future.

Keyword: *political party, local election, pragmatism*

Abstrak

Partai politik telah menemukan kembali momentum untuk dapat lebih berperan dalam proses politik termasuk dalam kontestasi pengisian jabatan publik. Tulisan ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarakan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Kata Kunci: partai politik, pilkada, pragmatisme

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat konstitusi, partai politik kembali memainkan peran yang signifikan dalam rekrutmen politik. Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sebagai tafsiran dari konstitusi juga menempatkan partai politik sebagai lembaga formal yang sah dan berhak untuk mengajukan kandidat kepala daerah dan wakilnya. Di masa Orde Baru sifat partai politik hanya berperan tambahan, bahkan pinggiran, mengingat keputusan siapa kandidat yang akan menduduki jabatan kepala daerah sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Secara umum partai-partai di masa itu tidak lain hanya menjadi "aksesoris" atas praktik penentuan kepala daerah yang bersifat *top down*. Format politik Orde Baru itu menyebabkan tidak hanya partai politik namun juga lembaga perwakilan daerah (DPRD) menjadi tidak berarti banyak dalam prosesi pilkada. Lembaga ini hanya menjadi sekadar pengesah atas apa yang telah dikehendaki oleh Soeharto, tidak terkecuali dalam soal pemilihan kepala daerah. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa upaya perlawanan atas kehendak itu, sebagaimana yang terjadi misalnya di DPRD Provinsi Riau pada tahun 1985. Saat itu mayoritas anggota DPRD Provinsi Riau lebih memilih Ismail Suko, seorang putra daerah yang dianggap akan lebih aspiratif, ketimbang, Imam Munandar, yang dikehendaki pemerintah pusat. Namun upaya itu akhirnya sia-sia belaka. Imam Munandar akhirnya tetap ditetapkan sebagai Gubernur Riau sebagaimana instruksi Presiden Soeharto.

Di masa-masa Reformasi, format politik itu sudah berubah. Dalam hal konstelasi hubungan eksekutif-legislatif, misalnya, makin terlihat adanya keseimbangan di antara kedua lembaga itu. Presiden tidak dapat lagi berperan tunggal tanpa adanya *political bargaining* dari pihak legislatif. Bahkan di awal reformasi sempat muncul wacana "*legislative heavy*" yang mengindikasikan demikian meningkatnya kekuasaan legislatif. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, peran pemerintah pusat pun semakin dibatasi atau bahkan dapat dikatakan telah dihilangkan. Saat ini semakin terlihat upaya untuk mewujudkan pola pemilihan *bottom up,* dimana kehendak rakyat banyak menjadi penentu keterpilihan seorang kandidat kepala daerah.

Sebagai konsekuensinya partai politik yang secara normatif sebagai media artikulasi kepentingan masyarakat dan secara konstitusional juga telah diberikan mandat sebagai lembaga politik yang berperan penuh dalam proses kandidasi memainkan peran yang dulu didominasi oleh kepentingan pemerintah pusat. Saat ini pula keberadaan partai politikmengalami revitalisasi dari sebuah institusi pelengkap menjadi institusi penentu dalam prosesi pilkada. Meski demikian, apakah partai telah benar-benar mampu menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang berperan dalam persoalan terkait dengan pilkada. Secara normatif legal-formalistik hal itu tidak dapat diragukan lagi. Namun bagaimana dengan kenyataan empiris di lapangan.

Dengan mengangkat kasus pilkada di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2017 sampai 2018 artikel ini akan mengetengahkan persoalan dengan pokok permasalahan bagaimanakah peran partai politik sesungguhnya dalam pilkada? Secara spesifik beberapa pertanyaan akan dijawab dalam artikel ini, yakni apakah partai politik telah benar-benar sebuah institusi yang dapat menerbitkan calon-calon kepala daerah yang mumpuni dan terpercaya? Apakah partai telah mampu bekerja tanpa adanya keterlibatan elemen lain di luar partai dalam prosesi pilkada? Apakah partai telah mampu menegakkan idealisme atau ideologi yang dimiliki pada ajang pilkada? Apa pula sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga kebanyakan masalah krusial yang terkait dengan partai tidak terpecahkan oleh partai itu sendiri hingga memunculkan beberapa problem mendasar dalam pilkada? Artikel ini juga akan menjawab hal-hal dibalik itu semua sembari memberikan skema solusi atasnya.

Diangkatnya kasus kandidasi dalam beberapa pilkada di Jawa menjadi menarik karena Jawa kerap dianggap barometer politik nasional. Artinya, apa yang terjadi di Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur) dalam beberapa aspek merupakan cerminan kondisi politik secara umum di level nasional dan sesungguhnya dapat pula dijadikan pelajaran

berharga untuk mengtisipasi persoalan-persoalan sejenis di wilayah-wilayah lainnya.

Dalam beberapa aspek para sarjana politik cenderung menempatkan fungsi-fungsi partai sebagai bagian penting dari keberadaan partai politik itu sendiri. Fungsi-fungsi yang ada dalam partai demikian kompleks namun secara umum menyiratkan hal-hal yang terkait dengan persoalan internal dan eksternal partai serta yang terkait diantara keduanya. Secara internal fungsi partai politik itu meliputi pembinaan atau pengkaderan anggota-anggotanya, melakukan sosialisasi politik internal terkait dengan ideologisasi dan manajamen konflik[1]. Sementara dalam konteks eksternal hal ini termasuk misalnya sosialisasi kebijakan publik, artikulasi pemandu kepentingan publik, melakukan agregasi kepentingan dalam ranah pembuatan kebijakan, pendidikan politik kepada masyarakat dan komunikasi politik di dalam konteks menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat.

Selain ini sebagai lembaga yang diciptakan untuk memenangkan kontestasi politik, khususnya dalam hal pengisian jabatan-jabatan publik. Secara umum hal itu adalah dalam rangka mengekalkan peran partai politik yang sesungguhnya sebagai sebuah mesin pemenangan dalam kontestasi politik yang membawa idealisme tertentu yang disepakati sekelompok orang. Namun demikian terdapat fungsi yang saling terkait antara fungsi internal dan eksternal. Dalam konteks internal ini fungsi partai sebagai lembaga pencetak pejabat publik haruslah dilakukan. Kegagalan dalam upaya ini menjadi indikasi kuat bahwa partai belum dapat seutuhnya memainkan fungsi yang harusnya dilakukan. Sayangnya tidak semua partai dapat mewujudkan hal ini. Artikel ini akan memanfaatkan tiga konsep utama sebagai landasan dan kerangka pemikiran, yakni konsep pelembagaan, *post-democracy party* dan pragmatisme politik.

Salah satu penyebab dari berbagai persoalan kerentanan dalam partai dewasa ini – termasuk di dalamnya lemahnya pelaksanaan fungsi-fungsi partai, kandidasi dan terjadinya oligarki – adalah karena masih lemahnya pelembagaan. Dalam spektrum teoritis konsep pelembagaan partai merupakan bagian dari pendekatan neo-institusional yang menempatkan institusi sebagai suatu hal pokok atau fundamental karena diyakini menjadi penentu bagi performa partai dan kadernya. Pelembagaan yang dimaksud terkait dengan empat persoalan mendasar yakni (1) terciptanya derajat kesisteman yang tinggi, (2) memiliki kemapanan nilai-nilai karena berjalannya transmisi nilai dalam partai atau *value infusion*, (3) memiliki derajat otonomi yang tinggi dan (4) terekam baik dalam benak publik (reifikasi)[2].

Dengan empat indikator di atas maka partai yang tidak atau belum terlembaga ditandai dengan *pertama*, belum mampu membangun mekanisme aturan main atau sistem internal yang serba mencakup dan dilaksanakan oleh seluruh kader. Penghargaan pada sistem belum tumbuh dengan sebaik-baiknya, mengingat kadang kepentingan elite atau "orang kuat" dapat melampaui sistem. *Kedua*, lemahnya *value infusion* yang mengakibatkan partai tidak memiliki nilai-nilai yang kokoh untuk dijadikan penjuru bagi cara pandang, sikap dan kebijakan partai. Akibatnya kepentingan yang eksklusif dan temporal yang tidak terkekang oleh idealisme partai menjadi acuan dalam menuntun cara berpikir dan bertindak. Kondisi ini mengarah pada menguatnya pragmatism, baik internal maupun aktifitas partai pada umumnya.

Ketiga, pelembagaan yang buruk membuka peluang menguatnya campur tangan pihak-pihak di luar partai dalam turut mengendalikan keputusan partai. Hal ini menyebabkan otonomi partai menjadi terganggu yang kemudian kerap berujung pada "terbelinya aspirasi". Pihak-pihak luar itu sendiri dapat berupa kelompok atau organisasi tertentu atau tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan finansial. *Keempat*, selain itu, kegagalan atau kelambanan pelembagaan juga melemahkan upaya partai untuk dapat benar-benar eksis di tengah-tengah masyarakat.

[1] Lihat: Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1978); Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992).

[2] Lihat: Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Instutitionalization in New Democracies", *Party Politics*, Vol. 8, 1(Januari 2002). Dirk Tomsa, *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto Era*. (New York: Routledge, 2008). Andreas Ufen, "Political Party and Party System Indstitutionalization in South East Asia: A Comparison of Indonesia, The Philippines and Thailand". *GIGA Working Papers 44/2007*, March

Partai menjadi sesuatu yang asing yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya daya ingat akan hal-hal positif masyarakat terhadap partai politik. Tidak mengherankan jika muncul kemudian ketidaksingkronan antara aspirasi atau kepentingan masyarakat dengan partai

Sementara itu terkait dengan pengokohan oligarki saat ini kajian politik di Indonesia cenderung mengarah pada pembahasan tentang masih kuatnya oligarki atau elitisme dalam kehidupan demokrasi kita[3]. Kondisi ini berimbas dalam kehidupan partai politik di Indonesia. Muncul kemudian berbagai fenomena seperti apa yang disebut sebagai *cartel party*[4], *personalization of political party*[5], *party presidentialization*[6] atau partai yang mengalami personalisasi. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa partai politik berada dalam bayang-bayang pucuk pimpinan dan kroninya. Sehubungan dengan itu ada sebuah konsep yang cukup menarik yang secara fundamental menghinggapi partai-partai saat ini yakni *post-democracy party*.

Artikel ini memanfaatkan konseptualisasi Crouch[7] mengenai *post-democracy* dan menafsirkannya sebagai partai memiliki lima karakter yakni, 1) eksklusif dalam menyusun *inner circle* kekuasaan yang bergantung pada pendiri partai ketimbang proses kaderisasi pada umumnya, 2) mengandalkan peran pendiri dan korporat yang mereka miliki dalam memenuhi kebutuhan finansial, ketimbang iuran anggota atau sumbangan lainnya, 3) mengutamakan soal *electoral enabling* ketimbang *democracy empowerment*, terutama melalui pendekatan populis, 4) dalam menyusun kebijakan dan agenda partai bersifat elitis dan *top-down*, dan 5) sulit memelihara loyalitas ideologis dan menghadirkan partisipasi yang artifisial[8]. Artikel ini melihat relevansi karakteristik partai di atas yang dapat dimanfaatkan dalam memahami persoalan peran elite/oligarkh dan punahnya ideologi dalam percaturan politik lokal.

Terkait dengan pragmatisme, hal itu dapat dipahami sebagai sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan tujuan praktis ketimbang ideologis[9]. Dewasa ini pragmatisme dalam politik bergerak dalam dua domain utama yakni pada level masyarakat atau akar rumput dan di level elite. Beberapa pengalaman aktivis politik atau kader partai mengkonfirmasi situasi bahwa dalam dua domain itulah pragmatisme telah berkembang dengan suburnya. Pada level masyarakat, pragmatisme muncul sebagai bentuk ”pemanfaatan situasi” atau momen politik untuk perbaikan kondisi kehidupan mereka dalam pengertian yang kompleks secara instan. Setidaknya dua faktor yang melandasi sikap pragmatis masyarakat.

Pertama, pilihan politik yang didasarkan pada skeptisisme terhadap kondisi politik yang dihadapinya. Dalam hitungan mereka berbagai persoalan yang mereka hadapi harus mendapatkan jawaban secara ”konkret” ketimbang normatif-idelogis semata. *Kedua*, masalah kesejahteraan yang masih belum meluas atau merata. Persoalan keterbatasan ekonomi ini kerap berujung pada pragmatisme yang kerap berlebihan dimana akhirnya penerimaan atau penolakan mereka atas sebuah kebijakan atau keberadaan kelompok

[3] Lihat: Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta: Gramedia, LIPI and IMD, 2004); Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky, eds., *Beyond Oligarchy. Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics*, (Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2014); Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, (London: Rouledge Curzon, 2004); Jeffery A. Winters, “Oligarchy and Democracy in Indonesia” in Ford, Michele and Pepinsky, Thomas B. *Beyond Oligarchy. Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics*, (Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2014).

[4] Richard Katz dan Peter Mair, *How Party Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies*, (London: Sage Publication, 1994); Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel. Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: Kepustaan Populer Gramedia, 2009).

[5] Jorgen Hermansson, *The Personalization of Party Politics: The Voters Perspectives*. Unpublished manuscript. (Uppsala: Dept. of Government, Uppsala University, 2011).

[6] Andreas Ufen, “Party presidentialization in post-Suahrto Indonesia”, *Contemporary Politics*, Volume 24, Issue 3 (2018):306-324.

[7] Colin Crouch, *Post-Democracy*, (Cambridge: Polity Press, 2004).

[8] Lihat: Firman Noor, “The Phenomenon of Post-Democracy Party”, *Jurnal Penelitian Politik,* Vol.14, No.2 (2017).

[9] Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction.* (Hampshire and London: the Macmillan Press Ltd), 1992, hlm. 317

politik lain lebih disebabkan oleh seberapa besar manfaat material sesaat yang akan mereka terima.

Sementara pada level elit atau parpol, keinginan untuk tetap berada dalam domain atau pusaran kekuasaan merupakan faktor penyebab utama dari tumbuh dan menguatnya sikap pragmatis. Terdapat beberapa motif berkoalisi dari masing-masing partai yang dapat dibagi menjadi beberapa hal. *Pertama*, adalah motif ideologis yang terutama adalah untuk mewujudkan keyakinan ideologi. *Kedua*, pada level yang lebih rendah adalah kepentingan untuk mewujudkan agenda. Motif kedua ini dapat dikatakan merupakan turunan dari ideologi yang lebih adaptif, kontekstual dan kompromistis.

Ketiga, adanya kesamaan pandangan mengenai sosok ideal seorang pemimpinan. Motif ini tidak sepenuhnya didasari oleh hal-hal ideologis atau strategis, namun semata karena sosok tersebut dianggap mampun menjawab persoalan yang dihadapi. *Keempat*, opportunis-praktis. Alasaan ini jelas tidak didasari kepentingan ideologis, agenda atau kualitas kandidat. Pilihan pragmatis ini semata didasarkan pada kepentingan untuk meraih kemenangan agar dapat turut mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pada kepentingan ini dukungan akan diberikan kepada pihak yang memiliki potensi untuk memang lebih besar.

Dalam konteks pilkada dampak yang diberikan terhadap kondisi-kondisi di atas –yakni lemahnya pelembagaan, kecenderungan oligarki, dan pragmatisme– dapat menjadi demikian kompleksnya, meliputi dampak bagi kondisi di dalam maupun di luar partai. Dalam konteks internal hal ini termasuk dalam persoalan kandidasi yang dilakukan oleh partai politik. Kandidasi secara konseptual terbuka peluang terjadinya praktik oligarki dan pragmatisme politik. Fenomena kandidasi dan juga koalisi pada akhirnya dapat menjadi indikasi seberapa besar sebenarnya praktik oligarki dalam sebuah partai.

Selain itu secara internal hal ini memunculkan hadirnya kandidat-kandidat yang bukan seorang kader, yang memperlihatkan lemahnya sistem dan mekanisme pembinaan kader (kaderisasi) dan faktor kompromi elitis. Sementara dalam konteks eksternal atau di luar partai kondisi-kondisi ini cenderung menguatkan peran jaringan non-partai dalam tarik menarik kepentingan dalam pilkada. Selain itu hal ini juga menumbuhkan potensi tergerusnya idealisme saat membangun koalisi, dimana koalisi oportunis-pragmatis menjadi semakin berpeluang untuk terbentuk.

Pragmatisme Partai dalam Pemilihan Kepala Daerah

Walaupun partai telah diberikan amanat untuk berperan besar dalam kehidupan politik termasuk menentukan masa depan daerah melalui proses pemilihan kepala daerah, dalam prakteknya partai terdapat dua persoalan besar yakni *pertama*, kuatnya nuansa pragmatism dan *kedua*, peran kalangan non-partai dalam prosesi pilkada terutama pada saat kampanye hingga menjelang pencoblosan. Kedua hal utama itu tercermin dari setidaknya empat realitas yakni 1) kandidat kepala daerah yang bukan pimpinan partai di wilayah tempat kontestasi politik terjadi, 2) peran yang signifikan dari jaringan non-partai atau relawan, 3) proses kandidasi atau seleksi yang elitis, 4) terbentuknya koalisi pelangi nir-ideologi.

a. *Kandidat yang Bukan Pimpinan Partai atau Kader*

Beberapa kandidat yang terjun dalam ajang pilkada bukanlah kader partai sama sekali. Dalam kasus kekinian beberapa kandidat murni orang luar partai yang karena kapasitasnya dianggap jauh lebih mumpuni dari kader partai menjadi kandidat. Dapat kita lihat misalnya di Pilkada Gubernur di seluruh Pulau Jawa dalam kurun waktu 2017-2018. Pada pertarungan Pilkada Banten terdapat dua kandidat yakni Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarif. Embay Mulya Syarif bukanlah kader partai saat bertarung dalam Pilgub Banten.

Begitu juga yang terjadi di Provinsi DKI. Dalam dua pasang kandidat Basuki T. Purnama (Ahok) -Djarot Saiful Hidayat dan Anies-Sandi, baik Ahok dan Anies tidak dalam statusnya sebagai anggota partai. Ahok dapat dikatakan telah bebas dari keanggotaan partai sejak 2014. Bahkan meski pernah menjadi anggota

Tabel 1. Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur di Lima Provinsi Pulau Jawa dalam Pilkada (2017-2018)

No	Provinsi	Partai Pendukung	Kandidat Gubernur	Latar Belakang Politik	Kandidat Wakil Gubernur	Latar Belakang Politik
1	Banten	Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, Hanura, & PAN	Wahidin Halim	Kader Demokrat	Andika Hazrumy	Kader Golkar
		PDIP, PPP, & Nasdem	Rano Karno	Kader PDIP	Embay M Syarif	***Non-Partai***
2	DKI	Demokrat, PPP & PKB	Agus H. Yudhoyono	Kader Demokrat	Sylviana Murni	***Non-Partai***
		Gerindra, PKS & PAN	Anis Baswedan	***Non-Partai***	Sandiaga Uno	Kader Gerindra
		PDIP, Golkar, Nasdem & Hanura	Basuki T. Purnama	***Non-Partai***	Djarot S. Hidayat	Kader PDIP
3	Jawa Barat	PPP, Nasdem, & PKB	Ridwan Kamil	***Non-Partai***	Uu R Ulum	Kader PPP
		Demokrat & Golkar	Dedy Mizwar	Kader (Baru) Demokrat	Dedi Mulyadi	Kader Golkar
		Gerindra, PKS & PAN	Sudrajat	Kader Gerindra	Ahmad Syaikhu	Kader PKS
		PDIP & Hanura	TB Hasanudin	Kader PDIP	Anton Charliyan	***Non-Partai***
4	Jawa Tengah	PDIP, Golkar, Demokrat, PPP & Nasdem	Ganjar Pranowo	Kader PDIP	Taj Yasin	Kader PPP
		Gerindra, PKS, PKB, & PAN	Soedirman Said	***Non-Partai***	Ida Fauziah	Kader PKB
5	Jawa Timur	Golkar, Demokrat, Nasdem, PPP, PAN, Hanura	Khofifah I. Parawansa	***Non-Partai***	Emil Dardak	***Non-Partai***
		PKB, PDIP, Gerindra & PKS	Syaifullah Yusuf	***Non-Partai***	Putri Guntur Soekarno	Kader PDIP

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

*Catatan: Latar belakang politik adalah status politik kandidat terkait dengan partai saat dicalonkan.

Gerindra dan dicalonkan sebagai kandidat wagub mendampingi Jokowi oleh partai tersebut, hubungan Ahok dengan Gerindra layaknya minyak dengan air. Gerindra, terutama yang tergabung dalam Fraksi Gerindra DPRD DKI diberitakan sebagai elemen anti-Ahok yang kuat[10].

Situasi yang tidak jauh berbeda muncul pula di Jawa Barat. Kandidat-kandidat kuat seperti Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar bukanlah kader ataupun kader lawas partai. Ridwan Kamil yang akhirnya terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat hingga kini tetaplah tokoh non-partai. Adapun Deddy belum lama bergabung dengan

[10] Alsadada Rudi, "Mengapa Fraksi Gerindra sangat Benci Ahok", https://megapolitan.kompas.com, diakses pada 20 Agustus 2018.

partai berlambang *mercy* itu, yang dengan demikian belum sepenuhnya mengikuti prosesi pengkaderan partai[11]. Sementara itu di Jawa Tengah Cagub Sudirman Said adalah sosok profesional yang independen saat dicalonkan. Adapun di Jawa Timur baik Syaifullah Yusuf atapun Khofifah dan Emil, ketiganya bukan kader partai manapun saat dicalonkan. Syaifullah Yusuf terakhir tercatat adalah kader PKNU yang kemudian tidak pernah aktif di partai yang juga akhirnya gagal ikut dalam pemilu 2014 itu. Sedangkan Khofifah sudah sekitar satu dekade meninggalkan PKB. Sementara Emil Dardak bukan lagi menjadi kader PDIP sejak 2015.

Meski pencalonan orang-orang independen itu diperbolehkan, baik dalam aturan main pilkada maupun sebagai hasil aturan internal partai, namun secara mendasar fenomena ini merupakan cermin kegagalan fungsi partai dalam mencetak atau membina kadernya untuk menjadi pemimpin, bahkan dalam level lokal sekali pun. Di awal reformasi kondisi ini mungkin masih dapat dipahami, mengingat bahwa situasi yang masih bersifat transisional, atau partai memang belum benar-benar siap. Namun saat ini, setelah partai-partai telah eksis hampir 20 tahun lamanya, jelas kondisi sedemikian sesungguhnya tidak lagi dapat dibenarkan.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 13 kandidat calon gubernur hanya 7 kandidat yang kader partai. Dari ketujuhnya itupun ada kandidat yang berstatus masih kader baru yakni, Deddy Mizwar dan seorang kader yang pernah dipecat dari pengurus partai karena masalah disiplin dan loyalitas yakni Wahidin Halim. Artinya sebetulnya hanya ada lima orang yang benar-benar kader yang telah lama malang melintang dan berkecimpung dalam partai dengan *track record* yang relatif baik. Ketujuh kader partai itu berasal dari tiga partai saja yakni, PDIP, Gerindra dan Demokrat.

Sementara partai-partai yang lain merasa nyaman untuk mendukung bukan kadernya. Beberapa partai bahkan berkomitmen menjadi inisiator pencalonan kandidat yang jelas-jelas merupakan kader dari partai lain atau kandidat dari non-partai. Di antaranya Golkar untuk Wahidin Halim, Nasdem untuk Ridwan Kamil, Gerindra untuk Anies Baswedan dan Sudirman Said, serta seluruh partai untuk pasangan Khofifah dan Emil.

Selain itu keseluruhan kandidat Gubernur dan sebagian besar kandidat Wakil Gubernur adalah bukan pimpinan partai di wilayahnya. Baik Wahidin Halim maupun Rano Karno bukanlah pucuk pimpinan partai di wilayah Banten. Wahidin Halim bahkan adalah mantan Ketua DPD Demokrat yang dipecat dari jabatannya, karena dianggap tidak loyal pada partai. Ketua DPD PDIP Banten adalah HM Sukira. Begitu pula dengan Anies Baswedan ataupun Ahok.

Anies adalah sosok independen yang selama ini justru berseberangan secara politik dengan Gerindra dan PKS, dua partai yang belakangan justru mengusungnya di Pilkada DKI. Sementara Ahok adalah anggota biasa di kepengurusan Gerindra DKI Jakarta yang belakangan justu tidak aktif lagi di partai itu. Sedangkan Agus H. Yudhoyono adalah orang pusat yang tidak terkait dengan struktur kepengurusan partai di DKI Jakarta.

Sementara itu di Pilkada Jabar, hanya Dedi Mulyadi yang notabene adalah pimpinan wilayah saat dicalonkan. Namun Dedi pun tidak dicalonkan untuk posisi gubernur. Sedangkan untuk posisi cagub keseluruhannya adalah bukan pimpinan parpol di wilayah atau daerah Jawa Barat. Sudrajad bahkan orang yang relatif asing di Jawa Barat. Sementara pasangan kandidat T.B Hasanudin dan Anton Charliyan bahkan adalah murni pasangan "orang pusat". Situasi yang hampir sama terjadi Jateng dan Jatim. Kesemua kandidat cagub dan cawagub di Jateng adalah bukan pimpinan partai di wilayahnya.

Meski pasangan Ganjar-Yasin adalah "produk lokal" namun keduanya bukanlah sosok-sosok pucuk pimpian pengurus partai di Jateng. Sedangkan Sudirman Said dan Ida Fauziah adalah figur-figur yang telah lama malang melintang di kehidupan politik nasional, sehingga lebih terasa

[11] Beberapa waktu kemudian Deddy Mizwar bersedia untuk menjadi salah satu jubir Jokowi-Maruf dalam ajang Pilpres 2019. Sebuah sikap yang tentu saja bertentangan dengan kebijakan partainya. Sikap semacam ini dapat dipahami karena loyalitas yang dapat sesungguhnya dapat terbangun dalam proses kaderisasi yang diterima secara berkala belum terbangun. Ini memperlihatkan pula bahwa kebaruan dirinya dalam Partai Demokrat saat dicalonkan menjadi gubernur.

sebagai "orang pusat". Sementara untuk Jatim, situasi tidak jauh berbeda. Walaupun kombinasi tokoh nasional dan lokal terjadi, namun keempat tokoh yang dicalonkan, baik untuk posisi cagub (Syaifullah dan Khofifah) maupun cawagub (Puti dan Emil) bukanlah para pimpinan pengurus partai di Jawa Timur.

Ada beberapa pelajaran lain dari situasi ini. Hal yang pertama adalah kegagalan kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan. Terlihat bahwa posisi dewan pimpinan daerah atau wilayah tidak berarti banyak. Siapapun yang duduk dalam posisi itu dapat mudah saja di *by pass* oleh siapapun karena kepentingan politik praktis. Sejauh hal itu mendapat restu dari DPP maka apapun dapat terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa *bargaining positio*n DPW sangat lemah sekaligus menunjukkan terutama sekali bahwa pengkaderan tidak menentukan karir seseorang untuk menduduki jabatan publik sesuai jenjang yang dimilikinya.

Selain itu situasi ini juga mencerminkan kegagalan partai untuk menciptakan kader-kader yang mumpuni baik, dari sisi tata kelola pemerintahan maupun politik. Akibatnya seorang pimpinan wilayah tetap pada akhirnya dirasa belum cukup matang dan tangguh untuk bertarung di wilayahnya sendiri. Situasi ini juga sejalan dengan lemahnya pendekatan partai kepada masyarakat yang menyebabkan rasa keterikatan dan kepopuleran (reifikasi) tokoh pimpinan di mata masyarakat di wilayahnya menjadi demikian lemah, hingga tak cukup "layak jual".

Dengan situasi di atas terlihat jelas bahwa partai-partai belum benar-benar melakukan kaderisasi yang memadai. Ini terjadi baik dalam konteks pembinaan atau rekrutmen. Padahal rekrutmen merupakan hal penting dalam kehidupan partai dan aktifitas secara politik pada umumnya[12]. Lemahnya kaderisasi ini secara umum terjadi di seluruh Indonesia dan kebanyakan apa yang disebut sebagai "kaderisasi" merupakan kegiatan sporadis. Selain itu, partai kadang belum memiliki konsep atau tidak benar-benar mempraktekkan konsep pembinaan (dengan *reward* dan *punishment* yang memadai), yang pada akhirnya dapat mendorong dan menghasilkan kader memiliki karakter kuat dan terpercaya untuk menjadi seorang pemimpin daerah.

Akibatnya, kualitas kader akhirnya belum memenuhi standar yang diharapkan. Di samping itu, kegagalan kaderisasi ini juga berpotensi besar menyebabkan jarak antara kader partai dengan rakyat semakin besar, mengingat kader tidak terdorong dan termotivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat[13]. Komitmen yang tidak kuat ditambah dengan ketidakpastian sikap/loyalitas masyarakat memperburuk situasi ini. Tidak mengherankan jika kemudian partai terlihat menjadi seolah mati suri.

b. Menguatnya Peran Jaringan Non-Partai

Dalam pagelaran pilkada dewasa ini jaringan non partai atau kerap disebut sebagai jaringan relawan memainkan peran yang tidak dapat diremehkan. Situasi ini menunjukkan bahwa partai dan jaringan non-partai saling berlomba untuk memberikan yang terbaik bagi kandidat yang didukung. Di sisi lain ini dapat menandingi atau melampaui peran mesin partai yang resmi secara fundamental.

Prototipe jaringan non-partai atau relawan sudah ada sejak 2005 dan terus bergulir pada kasus-kasus pilkada setelahnya, yang memuncak pada momen Pemilihan Presiden 2014 dimana masing-masing kandidat pasangan calon presiden-wakil presiden memiliki sejumlah kelompok relawan yang cukup dapat pula bermakna peyoratif, dimana dalam kenyataannya keberadaan jaringan non-partai efektif dalam menggalang opini publik dan turut mempengaruhi preferensi politik mereka[14].

Fenomena kemunculan jaringan relawan adalah bagian dari upaya meluaskan dukungan, yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi atau kampanye pencalonan dan

[12] Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

[13] Firman Noor, "Partisipasi Publik", dalam Ikrar N. Bhakti, ed, *Evaluasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014*, (Jakarta: ERI, LIPI dan AEC, 2015).

[14] Lihat: Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam: Studi Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2015).

program-program seorang kandidat. Eksistensi jaringan relawan ini cerminan adanya partisipasi politik langsung masyarakat secara sukarela, yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat kita saat ini bersikap apatis terhadap politik. Selain itu keberadaan jaringan mencerminkan pula adanya ikatan emosional antara kandidat dengan kelompok masyarakat pendukung. Semakin meluas, beragam dan mendalam komitmen relawan itu, maka ini mengindikasikan semakin besarlah kedekatan diri, isu atau program yang dimiliki kandidat dengan masyarakat umum.

Ada dua domain yang menjadi fokus kerja jaringan relawan dalam pilkada. *Pertama*, dalam soal yang praktis yakni konsolidasi kekuatan jaringan pemenangan, mobilisasi dukungan, perluasan dukungan potensi pemilih dan sosialisasi program-program kandidat hingga persoalan logistik. *Kedua*, dalam penyusunan platform, visi dan misi kandidat hingga agenda-agenda atau program kandidat. Dalam dua soal itu, partai politik seharusnya memiliki otoritas dan porsi peran yang lebih besar dari jaringan relawan.

Namun kenyataannya, peran partai dalam domain-domain itu kerap bersaing oleh kelompok-kelompok relawan. Ini dapat terjadi terutama mengingat kualitas koordinasi dan efektiftas kerjanya yang kadang melampui jaringan ataupun *onderbouw* partai. Tidak jarang mesin beberapa partai, terutama partai-partai yang hanya "menggenapkan" syarat ambang batas, benar-benar tidak berperan secara maksimal.

Kemunculan jaringan relawan menjadi fenomena tersendiri di seluruh prosesi kampanye pilkada. Dalam kasus Pilkada Banten 2017 terdapat ratusan jaringan relawan yang berpartisipasi dan beroperasi di seluruh wilayah Banten hingga ke pelosok daerah. Pada pasangan Wahidin-Andika terdapat jajaran relawan seperti Wajib Bela Dulur, Balad Andika, dan Jaringkan Keluarga. Adapun Pasangan Rano-Embay disokong oleh banyak relawan, di antaranya adalah Relawan Merah Putih, Balad Bang Doel dan Rakyat Kampung (Erka). Sementara pada Pilkada DKI Jakarta, keberadaan simpul relawan juga nampak jelas terlihat dan memberikan warna tersendiri.

Puluhan jaringan relawan berkerumun dan berjuang di masing-masing pasangan, misalnya, Relawan Jakarta, Gerbang Jakarta, dan Forum Sandi Uno (FSU) untuk pasangan Anis-Sandi. Sementara Badja, Relawan Cinta Ahok dan Forum Rakyat Jakarta Bersatu untuk pasangan Ahok-Jarot. Dan relawan yang tergabung dalam Jaringan Nusantara, Masyarakat Indonesia dan Agus Fans Club (AFC) untuk pasangan AHY-Sylvi.Pada Pilkada Jabar, situasi yang sama juga terjadi. Seluruh pasangan kandidat dibantu oleh belasan bahkan puluhan relawan. Pasangan RK-Uu didukung kelompok relawan seperti Baraya Ridwan Kamil (Barka), Pesantren Dukung Ridwan Kamil, dan Masyarakat Dukung Ridwan Kamil (Madrid).

Sementara relawan yang menamakan diri sebagai Laskar Nagabonar, dan DM4Jabar, Barisan Kang Dedi Mulyadi (Barikade) mendukung pasangan Deddy-Dedi. Pasangan Sudrajat-Syaikhu didukung oleh relawan seperti Relawan Sudrajat Syaikhu (RSS), Relawan Matahari Asyik, dan Perempuan Indonesia Raya Adapun Hasanudin-Charliyan, mendapat dukungan dari relawan seperti Barisan Hasan Charliyah (Bahas), Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia dan Pagubyuban Pasundan.

Sementara itu Pilkada Jateng memunculkan relawan yang cukup beragam. Pasangan Ganjar-Yasin mendapat dukungan yang massif dan meluas, konon memiliki hingga lima puluh ribu relawan, tercermin dari banyaknya simpul relawan pendukung, di antaranya Dulur Ganjar, Santri Gayeng dan Forum Relawan Demokrasi (Foreder). Pasangan Sudirman-Ida banyak mengandalkan simpul-simpul NU, meski bukan satu-satunya. Barisan relawan pendukung pasangan ini di antaranya Tim Perjuangan Merah Putih, PADI dan Rencange Said-Ida. Sedangkan pada Pilkada Jatim muncil gugus-gugus relawan seperti Relawana Khofifah-Emil Dardak (ReKOD), Barisan Kawan Khififah-Mas Emil dan Pemuda Pemudi Khusus Era Mileial (PAKHEM) untuk pasangan Khofifah-Emil. Semantara Pasangan Syaifullah-Puti didukung oleh kelompok-kelompok relawan seperti Perjuangan Anak Bangsa (PAB), Masyarakat Peduli Pangan (MAPAN) dan Relawana Pro-Demokrasi (REPDEM)

Secara umum relawan yang tergabung dalam masing-masing kandidat mewakili banyak segmen atau tidak hanya mewakili satu kelompok saja. Terdapat segmen atas dasar usia, profesi, ideologi dan kedekatan personal dengan kandidat. Hingga pada dasarnya relawan itu bersifat lintas ideologi dan kepentingan ata dapat disebut sebagai "relawan pelangi". Beberapa kalangan termasuk para kandidat mengakui arti penting keberadaan para relawan. Simpul-simpul relawan itu berperan tidak sedikit dalam memberikan pemahaman atas latar belakang, isu-isu strategis dan agenda-agenda politik para kandidat. Para relawan juga berperan penting dalam menumbuhkan opini positif sekaligus menjawab berbagai opini negartif atau isu-isu negatif yang menyerang kandidat yang didukungnya.

Sudirman Said sebagai misal menyatakan dengan jujur bahwa peran para relawan itu luar biasa dalam menyukseskan kampanyenya yang memang tidak memiliki banyak uang[15]. Demikian pula dengan yang disampaikan oleh Sudrajat yang mengakui bahwa bentuk dukungan dari relawan itu mulai dari moril hingga logistik[16]. Komitmen mereka untuk bekerja sejak hari pertama kampanye hingga penghitungan suara, diakui misalnya oleh Rano Karno yang mengatakan bahwa peran relawan signifikan dan telah bekerja berbulan-bulan untuk "menjual" agenda dan kandidatnya[17]. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu B. Alhabsyi yang mengakui bahwa peran relawan dalam mengawal DPT demikian baik[18].

Situasi di atas memperlihatkan bahwa lemahnya partai dan juga memperlihatkan bahwa keberadaan partai dan *onderbow* partai belum cukup mampu bekerja sendirian dalam memenangkan seorang kandidat. Jaringan partai tidak memiliki efektiftas dalam meyakinkan akar rumput, juga tidak dapat masuk leluasa dalam wilayah-wilayah yang masyarakat cenderung a-politis atau tidak bersimpati kepada partai politik. Selain itu, partai dan perangkatnya terlihat kerap tidak cukup artikulatif bahkan tidak jarang terlihat amat pasif atau lepas tangan. Ini adaah cerminan keterasingan dan mesin partai yang tidak terlatih.

Ini menjadi salah satu penjelasan bahwa mengapa jumlah dukungan partai yang lebih banyak sama sekali tidak menjamin kemenangan. Malah kerap terjadi pasangan yang didukung oleh jumlah partai yang lebih sedikit justru dapat keluar sebagai pemenang karena ditopang oleh jaringan relawan yang memadai dapat menumbangkan kandidat dengan jumlah partai pendukung yang lebih besar. Lebih buruk dari itu, kerap terjadi perpecahan dukungan di antara sesama anggota partai yang menyebabkan peran partai menjadi semakin nyaris tidak terlihat. Dalam kepentingan semacam itu kepentingan dan marwah partai dapat dikorbankan demi popularitas kandidat semata. Secara umum ini membuktikan keringkihan partai.

c. Proses Seleksi Kandidat yang Elitis

Seleksi kandidat di atas menunjukkan adanya sebuah situasi elitis dalam proses kandidasi. Ini disebabkan karena patokan utama seleksi itu bukanlah hal-hal yang bersifat ideologis ataupun hasil dari proses Panjang kaderisasi. Kebanyakan partai saat ini cenderung menafikan kondisi ideal itu dengan membela kebijakan pragmatisnya atas dasar berbagai pertimbangan politik praktis yang berorientasi kemenangan semata. Pada umumnya partai mengatakan perlunya partai melihat kenyataan internal dan membangun sebuah "koalisi strategis" agar dapat memenangkan kontestasi pemilihan. Hal yang dikorbankan dalam cara pandang itu adalah tentu saja pada akhirnya kaderisasi, perwujudan ideologi dan kepentingan mendahulukan kader partai. Kesemuanya dikorbankan demi kepentingan pragmatis yakni peluang kemenangan kontestasi, yang secara substansial lebih didasari oleh kalkulasi politik para elite.

[15] Redaksi, "Sudirman Said: Relawan Kami Kerja Luar Biasa", 28 Juni 2018, https://regional.kompas.com/read/2018/06/28/08562251/sudirman-said-relawan-kami-kerja-luar-biasa, diakses pada 10 Agustus 2018.

[16] Redaksi, "Politik Hasil Kukurusukan, Pasangan Asyik Klaim Relawan di Jabar Bertambah", https://m.merdeka.com/politik/hasil-kukurusukan-pasangan-asyik-klaim-relawan-di-jabar-bertambah.html, diakses pada 10 Agustus 2018.

[17] Redaksi, "Rano Karno Nilai Strategis Peran Relawan di Pilgub Banten 2017", https://www.liputan 6.com/pilkada/read/rano-karno-nilai-strategis-peran-relawan-di-pilgub-banten-2017, diakses pada 12 Agustus 2018.

[18] Rmol, "PKS: Relawan Anies-Sandi Luar Biasa", 15 Februari 2017, https://rmol.co/amp/2017/02/15/280611/PKS:-Relawan-Anies-Sandi-Luar-Biasa, diakses pada 12 Agustus 2018.

Kenyataannya proses seleksi kandidat -- terutama sekali pada tahap penentuan akhir atau finalisasi nama kandidat -- kerap lebih ditentukan secara personal di level elite, baik elite di intra maupun antar partai. Kedudukan para elite sebagai sosok-sosok yang menentukan nasib kader secara umum menjadi sulit di tolak. Peluang terjadinya elitisme atau personalisasi dalam proses seleksi kandidat ini menjadi semakin besar karena memang aturan main internal partai cenderung memberikan peluang akan hal itu, dimana proses penentuan pada akhirnya ditentukan oleh elite partai semata.

Tidak ada satupun partai yang benar-benar memberikan peluang bagi kader untuk terlibat secara lebih intens dan menentukan. Di sisi lain situasi, ini ditopang oleh demikian mahalnya proses pilkada yang menyebabkan adanya ketergantungan kandidat pada jaringan finansial para elite dan tentu saja para oligark. Mereka berperan terutama sebagai "sponsor" yang akan membiayai keperluan kontestasi seorang kandidat. Keberadaan mereka lebih sebagai hasil kesepakatan politik yang eksklusif dengan para elite/oligark.

Nuansa elitis yang membatasi peran kader tidak dapat dihindari dalam pilkada kali ini. Dalam kasus yang terjadi di Provinsi Banten, manuver Partai Golkar berhasil menggalang dukungan partai-partai lain. Manuver yang meyakinkan dari Golkar mampu membawa gerbong partai untuk beramai-ramai mendukung Wahidin-Andika, meski Wahidin sendiri adalah sosok independen. Sementara pencalonan itu sendiri tidak banyak melibatkan kader partai. Hal yang sama juga terjadi di DKI Jakarta. Proses penentuan AHY, Anies Baswedan maupun Ahok merupakan hasil keputusan dan kesepakatan segelintir elite partai saja. SBY adalah sosok yang menentukan pencalonan AHY yang kemudian mampu mengajak elite partai dari PKB dan PPP untuk bergabung mendukung anaknya.

Peran Prabowo dan juga Jusuf Kalla sangat besar dalam memajukan Anies. Sementara keputusan mendukung Ahok-Jarot lebih merupakan hasil keputusan internal PDIP setelah mendapat lampu hijau dari Megawati. Pada kasus Jateng keputusan partai-partai untuk mendukung Ganjar Pranowo banyak dipengaruhi karena peluang besar dirinya untuk menang. Alasan pragmatis ini terbukti dapat mempersatukan partai-partai yang secara *chemistry* tidak dekat, yakni PDIP dan Demokrat. Adapun keputusan PKB untuk mendukung Sudirman lebih sebagai bentuk kekecewaan partai ini, khususnya Muhaimin Iskandar, atas keputusan Ganjar yang lebih memilih Taj Yasin yang notabene adalah kader PPP[19].

Di Jawa Timur keputusan untuk menentapkan Puti sebagai pendamping Saifullah juga lebih didasarkan pada keputusan elite PDIP[20]. Sekali lagi persetujuan Megawati menjadi Kartu As yang memungkinkan itu terjadi. Sementara nuansa elitisme di PKB yang kali ini memutuskan mendukung Saifullah, nampak terlihat dari hasil survei yang memperlihatkan pendukung partai ini justru cenderung memilih Khofifah[21]. Untuk kasus Khofifah-Emil nuansa kalkulasi elite terlihat dari adanya dukungan partai-partai yang pada pemilihan lima tahun sebelumnya bahu-membahu menolak dan mengalahkannya dalam pilkada, termasuk Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan Hanura.

Perubahan sikap partai-partai ini nampak lebih didasarkan pada peluang yang terbuka bagi Khofifah setelah Demokrat, dengan pertimbangan kompensasi dukungan Gubernur Jatim terpilih pada AHY baik sebagai capres ataupun cawapres[22], tidak memberikan dukungannya kepada Saifullah. Secara umum kalkulasi yang berorientasi pada pemenangan Pilpres 2019 memang tidak dapat dinafikan pada Pilgub Jatim mengingat provinsi ini memiliki jumlah suara terbesar kedua di Indonesia.

Kondisi elitis semacam ini memperlihatkan lemahnya keterikatan pimpinan partai pada

[19] Lihat: "Alasan PKB Batal Usung Ganjar-Taj Yasin di Pilkada Jateng", https://tirto.id/ alasan-pkb-batal-usung-ganjar-taj-yasin-di-pilkada-jateng, diakses pada 2 September 2018.

[20] Redaksi, "Jalan Panjang PDIP Munculkan Puti Guntur Soekarno", htpps://m.viva.co.id/amp/berita/politik/995398-jalan-panjang-pdip-munculkan-puti-guntur-soekarno, diakses pada 2 September 2018.

[21] Tribunnews, "Survei Populi: Pemilih PKB Lebih Pilih Khofifah-Emil", 4 Mei 2018, www.tribunnews.com, diakses pada 10 Agustus 2018.

[22] Redaksi, "Pengamat: Dukung Khofifah Cagub Jati, Demokrat Untung di Pilpres 2019", 21 Maret 2018, www.liputan6.com, diakses pada 10 Agustus 2018.

aspirasi kader apalagi publik pada umumnya. Memang tidak selamanya hal ini langsung menyebabkan ada *gap* inspirasi antara akar rumput dan elite partai. Namun proses kandidasi yang bersifat eksklusif seperti itu sebagaimana telah dikaji banyak kalangan bukanlah sebuah mekanisme yang sehat karena pada akhirnya cenderung mematikan aspirasi kader[23]. Akibatnya secara prinsip, fenomena partai sebagai *rubber stamp* atau sekadar alat pengesah keputusan elite atau petinggi partai tetap terjadi. Hanya saja saat ini bergeser saja dari parlemen ke partai itu sendiri.

Dampaknya adalah kemudian suara elite menjadi suara partai. Tidak ada kontrol internal yang efektif untuk menghentikan kebijakan-kebijakan elitis yang kerap melawan idealisme partai maupun aspirasi kader hingga simpatisan di akar rumput. Partai akhirnya hanya sekadar pemberi legitimasi atas kepentingan elite. Situasi ini juga cenderung menimbulkan apatisme yang tentu saja tidak sehat bagi eksistensi dan perkembangan partai. Hal ini karena demokrasi internal menjadi terbengkalai yang menyebabkan suara kader menjadi terabaikan.

Tidak mengherankan jika di sebagian partai kader partai pada akhirnya memiliki keterikatan semu dengan kandidat yang berujung pada kerja-kerja yang tidak efektif atau sepenuh hati pada saat kampanye. Bahkan dalam kasus PPP dan PKB di Jakarta, para kader nyata-nyata melawan kebijakan partai dengan berkampanye untuk pasangan yang merupakan lawan Ahok-Gatot.

Selain itu kondisi ini menyebakan partai akhirnya tetap hanya menjadi alat kepentingan tawar menawar politik (*political bargain*) para elite partai yang kemudian diklaim seolah-olah sebagai kepentingan seluruh partai bahkan seluruh masyarakat pemilih. Termasuk misalnya kepentingan mereka untuk sukses pada Pilpres 2019 tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu alasan penting, selain tentu saja alasan-alasan yang terkait dengan kepentingan lokal. Kondisi dimana partai sekadar menjadi alat elite ini amat mungkin terjadi karena hakekat partai yang sesungguhnya belum mewujud atau setidaknya dalam posisi yang demikian ringkih.

Situasi di atas tentu saja disayangkan mengingat partai seharusnya dapat berperan maksimal dalam mencetak dan mengawal kadernya dalam proses pencalonan. Begitu pula dalam menetapkan agenda atau program masing-masing kandidat. Idealnya program partailah yang harus dijadikan haluan atau pondasi kerja utama dari kandidat yang diusung. Oligarki menjadi semakin menguat bahkan memperoleh pembenarannya dengan dua persoalan tambahan.

Pertama adalah aturan main partai yang cenderung memberikan porsi besar bagi elite untuk memutuskan kebijakan partai terkait dengan kandidasi kepala daerah setingkat gubernur. *Kedua* berkembangnya keyakinan atau pandangan bahwa pilkada di Jawa harus dikuasai, mengingat Jawa merupakan lumbung suara dimana hampir separuh suara pemilih ada di sana. Oleh karenanya partai-partai merasa harus sedapat mungkin proses pilkada termasuk kandidasi dan koalisi harus benar-benar dikendalikan atau diarahkan oleh pusat. Dengan berbagai kondisi itulah kemudian partai sejatinya hingga kini tetap berada di bawah bayang-bayang elite dan oligarkh pendukungnya.

d. Koalisi Pelangi: Fenomena Konstelasi Nir-Ideologi

Sebagai kelanjutan dari situasi di atas, ideologi menjadi tidak bermakna dalam proses pilkada terutama dalam pembentukan koalisi. Sisi ini memperlihatkan dengan gamblang bagaimana ringkihnya partai politik dalam persoalan pembangunan visi atau ideologi yang seharusnya menjadi platform perjuangan dan tolok ukur dalam mengambil kebijakan dan melakukan manuver politik. Koalisi yang saat ini terbentuk bukanlah sebuah koalisi yang dilandaskan pada hitung-hitungan ideologis. Melainkan sebuah koalisi dadakan yang kerap bertemu atau baru terwujud diujung penentuan proses kandidasi.

Koalisi ini bersifat pragmatis, kerap diperhalus dengan sebutan koalis strategis, yang terutama dibentuk sebagai "jalan tengah" untuk mengakomodasi kepentingan (atau idealisme) partai dan mitra koalisinya. Meski demikian

[23] Smita Notosusanto, "Analisa AD/ART Partai Politik", makalah seminar, tidak dipublikasikan dalam *http://forum-politisi.org/downloads/Analisa_AD_ART_Parpol_-_Smita.pdf,* 2005.

melihat gelagat pembentukan partai koalisi yang dibentuk pada umumnya bersifat pragmatis yakni untuk kepentingan jangka pendek memenangkan pilkada dan jangka panjang yakni menaruh bidak-bidak demi kemenangan Pilpres 2019. Dengan lenyapnya ideologi maka tidak mengherankan jika setiap partai menjadi bebas bermanuver dalam membentuk mitra koalisi yang bersifat sesaat itu.

Koalisi non-ideologi ini pada akhirnya berperan dalam melahirkan yang disebut sebagai "koalisi pelangi". Koalisi pelangi ini pada dasarnya menunjukkan bahwa ideologi partai tidak memainkan peran yang signifikan dalam menentukan kandidasi. Dalam kacamata pelembagaan, dapat disebuatkan bahwa fungsi *value infusion* tidak berjalan dengan baik sehingga karakteristik partai-partai menjadi demikian sumir. Selain itu jika ditilik kaitannya dengan elitisme hal ini menunjukkan beroperasinya kepentingan segelintir orang dalam kehidupan partai yang perannya jauh melampaui kepentingan ideologi.

Koalisi semacam ini menjadi nyata dalam pertarungan pilkada di Jawa. Fenomena ini sesungguhnya hanya melanjutkan kondisi yang ada di level nasional. Dapat dilihat bahwa pola bahwa kepentingan yang utamanya menentukan hingga polarisasi partai-partai Islam dan partai kebangsaan semakin tidak relevan. Pada kasus Banten misalnya, seluruh kandidat yang berkontestasi memiliki dua unsur (Nasionalis-Islam dan Nasionalis-Sekular) itu. Begitupula para kandidat yang ada di Jakarta. Meski pada putaran pertama Ahok murni didukung oleh partai-partai sekular, namun pada putaran kedua PPP dan PKB menyatakan diri bergabung dalam koalisi pendukung Ahok-Djarot.

Sementara kondisi yang mirip terjadi di Jateng dan Jatim. Para pendukung kandidat yang berkontestasi nampak menggunakan paradigam atau formula yang sama bahwa kekuatan santri (religius) harus dipadupadankan dengan kekuatan abangan (sekular). Tidak mengherankan jika kemudian komposisi pendukung para kandidat itu terdiri dari kedua kelompok tersebut. Sudirman Said meski adalah sosok profesional, dia digolongkan sebagai tokoh non-santri yang kemudian disandingkan dengan Ida Fauziyah yang notabene adalah kader NU.

Begitupula dengan pasangan lawannya, yang memang Nampak sangat kentara perpaduan antara Ganjar sebagai tokoh PDIP Jateng dengan pasangannya GusYasin yang adalah putra Kyai NU berpengaruh K.H Maimoen Zubair. Sementara itu di Jawa Timur situasi perpaduan ideologi ini juga terlihat nampak. Khofifah merupakan tokoh Muslimat NU yang dipasangkan dengan Emil yang pernah menjadi kader PDIP. Adapun Syaifullah Yusuf yang masih kerabat dekat Gus Dur disandingkan dengan Puti yang masih kerabat dekat Megawati.

Hanya di Jawa Barat saja yang relatif terjadi pengecualian. Di masa dua pasangan murni mewakili hanya kelompok nasionalis sekular yakni Deddy-Dedi yang didukung oleh Demokrat dan Golkar dan Hasabudin-Anton yang didukung oleh PDIP. Namun demikian, tidak berarti pilihan itu didasarkan pada kepentingan ideologis. Persoalan-persoalan seputar tidak terakmodirnya tokoh dari partai Islam pada posisi penting di kedua pasangan itu. Selain itu keyakinan bahwa kedua pasangan itu telah cukup popular tanpa memperoleh dukungan formal dari partai-partai Islam nampak menjadi alasan utama di balik itu semua.

Lepas dari pengecualian pada kasus di Jawa Barat fenomena yang nampak nyata dari pilkada di Jawa adalah bahwa pragmatisme telah demikian berdiri kokohnya dalam percaturan politik nasional. Pada negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan, partai-partai dengan perbedaan ideologi tidak dapat begitu saja menggabungkan diri. Namun dalam konteks Indonesia hal ini sepertinya mudah saja terjadi. Hal yang sejatinya menunjukkan bahwa kepentingan pragmatisme partai dapat mengesampingkan kepentingan ideologis, sejauh hal itu dirasa akan lebih memberikan banyak keuntungan praktis bagi partai, khususnya para elite.

Solusi Multidimensi

Persoalan yang muncul dalam pilkada seperti di atas jelas tidak dapat dianggap remeh, mengingat keberadaanya tidak lain merupakan puncak dari gunung es persoalan mendasar yang harus diselesaikan. Kegagalan dalam menyelesaikan persoalan itu, yang terutama berakar dari internal partai sendiri dapat mengakibatkan tidak saja kondisi yang semakin parah dalam persoalan-persoalan di atas, namun juga dapat merembet pada bidang-bidang lain yang tentu saja semakin meningkatkan kompleksitas persoalan politik bangsa.

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa akar-akar persoalan terkait dengan (1) kaderisasi yang masih sporadis, (2) dalam bayang-bayang oligark, (3) pengaburan dan pelemahan peran ideologi. Melihat kompleksitas akar persoalan itu maka pembenahan yang harus dilakukan harus multidimensi meliputi persoalan yang terkait dengan kaderisasi, penguatan internal demokrasi, perluasan aktifitas partai hingga perbaikan regulasi.

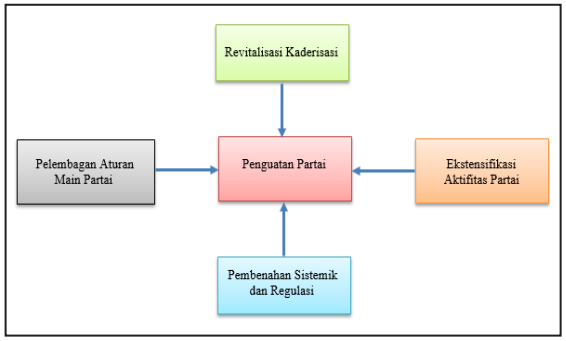

Gambar 1. Penguatan Partai terkait Pilkada

Sumber: diolah oleh penulis

Revitalisasi Kaderisasi

Dengan adanya pengkaderan yang baik maka partai dapat menjadi media pencurahan idealisme kader. Pelaksanaan kaderisasi harus berangkat dari konsep yang dijabarkan ke dalam mekanisme tertulis yang detail namun mudah dipahami/ tidak ambigu. Selain itu mekanisme kaderisasi ini harus disosialisasikan secara intens dan dilaksanakan secara konsisten dan berkala. Adanya kaderisasi yang baik akan memunculkan komitmen yang kuat kader untuk menjalankan dan mentransformasi agenda perjuangan partai menjadi agenda perjuangan dirinya.

Kader akan benar-benar bekerja atas dasar idelisme ke tengah-tengah masyarakat. Dengan komitmen yang tinggi maka intentias kegiatan partai akan lebih terasakan dan berkualitas. Selain itu kader akan turun ke tengah masyarakat tidak semata berbekal hal-hal yang bersifat materialistik namun membawa pesan-pesan ideologis atau idealisme yang didapatkan selama pelaksanaan kaderisasi. Idealisme ini termasuk dalam melihat makna politik yang sesungguhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Ini akan mengurangi meluasnya pragmatisme yang saat ini semakin dirasakan di tengah masyarakat.

Dalam konteks pilkada kaderisasi yang memadai akan membuat partai merasa bebas dalam menentukan kandidat atau membangun koalisi dengan perhitungan-perhitungan taktis yang juga dipenuhi nuansa ideologis/ idealisme. Dalam menetapkan dukungan, dengan demikian, parameter popularitas bukan menjadi posisi terbesar (apalagi menjadi satu-satunya alasan) ketimbang kepentingan ideologi. Hasil survei tidak begitu saja dapat "membatalkan" atau mengalahkan proses pembinaan dan pembangunan kader dan jaringan partai yang selama ini telah dilakukan. Dengan kata lain, kaderisasi akan menyebabkan pilkada akan lebih berorientasi pada idealisme/ideologi ketimbang sekadar kemenangan pragmatis.

Selain itu, jaringan non-partai (relawan) akan menjadi komplementer saja. Atau setidaknya menjadi kepanjangan tangan para kader. Sehingga dalam konteks pilkada tidak lagi kalah geraknya oleh para relawan. Hal ini terutama karena kader akan memainkan perannya sebagai alat partai yang mendukung keputusan partai dengan komitmen yang tinggi. Partai juga dapat menjadi mesin politik yang dapat berjalan secara baik dan efektif serta penuh idealisme. Kader pun akan termotivasi untuk melakukan transformasi diri menjadi pimpinan yang layak untuk berbicara dan terpilih dalam ajang pemilihan kepala daerah. Sehingga partai tidak perlu menjadi sekadar "perahu" bagi kader atau tokoh lain, dan menjadikan kader terbaiknya, yakni pimpinan DPD/DPW sebagai calon kepala daerah di wilayahnya.

Pelembagaan Aturan Main Internal Partai

Untuk mengurangi nuansa oligarkis atau elitisme yang berlebihan maka aturan main perlu dilembagakan. Penegakan aturan main yang dimaksud adalah menjadikan aturan main sebagai satu-satunya landasan atau penjuru aktifitas partai. Pelembagaan ini juga ditujukan untuk dapat menguatkan otonomi melalui pembebasan partai dari manuver individual orang kuat. Pelembagaan yang benar akan membuka pula peluang bagi kemandirian finansial partai yang pada akhirnya dapat membebaskan partai dari bayang-bayang oligarkh[24]. Keterkungkungan partai dalam genggaman oligarkh karena aturan main terkait finansial tidak dibuat dan dilaksanakan secara kondisisten, sehingga memunculkan kebangkrutan internal[25].

Secara mendasar adanya pelembagaan aturan main ini akan membantu partai dalam meningkatkan legitimasi keputusan partai. Dengan terlaksanaan pelembagaan semacam ini keputusan-keputusan partai lebih terasakan sebagai keputusan kolektif dan secara mendasar dapat dipertanggungjawabkan sebagai murni suara atau kepentingan partai, bukan kepentingan para elite atau oligarkh semata[26]. Kondisi ini juga membuka peluang terciptanya kebijakan yang lebih aspiratif dan demokratis, mengingat aturan main partai pada umumnya memberikan peluang anggota atau kader untuk bersuara untuk didengar suaranya itu oleh partai. Dengan situasi ini tentu saja kedudukan orang kuat dan oligarkh juga dapat dikurangi secara sistematis.

Sehubungan dengan pelaksanaan pilkada, pelembagaan aturan main ini pada dasarnya akan menyebabkan proses kandidasi akan lebih terkontrol dan aspiratif. Dengan situasi ini berbagai kecurigaan dan kekecewaan dapat didialogkan dengan lebih luas sehingga pada akhirnya ada rasa memiliki dan daya juang yang lebih tinggi dalam pilkada. Selain kandidasi, juga dengan berjalannya pelembagaan ini, partai dapat lebih mengontrol agenda dan program partai, tidak semata bergantung pada "tim asing" bentukan kandidat, yang tidak terkait apapun dengan kepentingan partai, selain semata mengejar kemenangan.

Kedua hal minimal inilah yang pada akhirnya dapat mendoring partai untuk lebih *all out* dan unggul dalam mengorganisir kemenangan termasuk dalam mulai dari menggalang massa, menciptakan simpul-simpul hingga mengamankan logistik pemenangan kandidat, tanpa harus bergantung pada pihak lain. Selain itu partai menjadi merasa lebih bertanggungjawab dalam mempertahankan posisi idealisme dan ideologisnya karena sudah merupakan sebuah keputusan kelembagaan yang tidak bisa dengan mudahnya diabaikan, meski dengan tawaran-tawaran pragmatism yang menggirukan sekalipun. Pada akhirnya "peran program" partai akan juga nampak jelas dan transparan manakala hal semua ini dapat terjadi.

Ekstensifikasi Aktifitas Partai

Perluasan aktifitas partai dan kader-kadernya di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah keharusan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan mulai dari pendidikan politik, advokasi, bantuan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Dalam kegiatan itu dapat saja partai mempromosikan partai dan dirinya dalam rangka mengenalkan visi/misi berikut agenda/kegiatan partai. Namun pada dasarnya partai harus lebih "berinvestasi" di tengah publik melalui kegiatan-kegiatan yang terasakan, baik dalam makna pencerahan atau pendewasaan politik maupun peningkatan daya tahan dan daya saing masyarakat.

Hal ini di satu sisi perlu dilakukan agar dapat menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan real yang dihadapi oleh masyarakat banyak di daerahnya. Ini terutama dimaksudkan untuk mereduksi keterasingan aspirasi dan kepentingan. Sejauh keterasingan itu nyata, secara politis kandidat-kandidat non-partai yang popular akan selalu menjadi "ancaman" bagi karir politik seorang kader partai. Di sisi lain, agar publik dapat mengidentifikasi kinerja partai atau kader,

---

[24] Lihat: Marcus Mietzner, *Money, Power, and Ideology. Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. (Singapore: ASAA Southeast Asia Publication Series, 2013).

[25] Lihat: Veri Junaidi, dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik. Pengaturan dan Praktek*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011); Didi Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik.* (Jakarta: Yayasan Perludem, 2012).

[26] Smita Notosusanto, "Analisa AD/ART Partai Politik..,

yang akhirnya dapat membantu membangun persepsi positif pada partai dan kader-kadernya. Persepsi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan atau pengenalan masyarakat dan mempengaruhi tingkat penerimaan atas pencalonan seorang kader partai.

Dalam konteks pilkada perbaikan dalam soal ini akan menyebabkan partai dapat lebih menguatkan kemandirian dan daya tawar (*bargaining position)* karena dapat lebih percaya diri bahwa mereka eksis di tengah masyarakat. Dengan adanya kedekatan baik emosional maupun ideologis yang terbangun sepanjang beraktifitas itu, pilkada akan tidak didominasi oleh "serangan fajar" yang pada dasarnya merupakan bentuk pembelian suara secara kotor yang mencederai makna demokrasi. Karena demokrasi hanya sekadar menjadi alat mensukseskan keterpilihan seseorang tanpa para pemilih benar-benar menggunakan rasionalitasnya dalam menentukan pilihannya.

Selain itu tidak saja dengan kokohnya kedekatan dengan masyarakat itu menyebabkan langkah "membeli dukungan" partai lain tidak terlalu diperlukan, partai pun akan dapat menjadi motor gerakan pemenagan sementara relawan hanya benar-benar sebagai pelengkap saja. Karena pada akhirnya partai dapat dengan sendirinya melakukan mobilisasi yang cukup massif di tengah-tengah masyarakat.

Pembenahan Sistemik melalui Regulasi

Dimensi lain yang tidak dapat diabaikan dalam membenahi kualitas pilkada adalah pembenahan dari sisi regulasi. Regulasi memainkan peran signifikan dalam turut menguatkan peran partai dan mengikis pragmatisme. Saat ini regulasi yang ada belum memaksimalkan upaya mendukung dua persoalan di atas. Terkait dengan hal itu, setidaknya ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. *Pertama*, adalah bahwa dalam pilkada itu ketentuan *Presidential Treshold* (PT) di level nasional sebaiknya tidak diberlakukan lagi. Aturan semacam ini telah membuka peluang terciptanya koalisi yang didasarkan pada tawar menawar pragmatis semata karena kepentingan mendapatkan dukungan.

Kedua, regulasi keharusan dilakukannya kaderisasi yang sesuai standar di masing-masing partai. Sampai sejauh ini partai tidak merasa terpicu untuk melakukan kaderisasi secara memadai karena tidak adanya "ancaman" dari regulasi yang ada. Ketiga, perlu diatur secara lebih komprehensif proses kandidasi yang berlandaskan spirit demokrasi internal dan keterlibatan masyarakat banyak dengan melalui uji publik. Selama ini kandidasi cenderung bersifat elitisme-oligarkis. Hal yang kemudian menumbuhsuburkan kesepakatan politik pragmatis yang mematikan semangat ideologis dan mengacaukan pembangunan internal partai.

Adanya dukungan regulasi ini secara umum akan membuat partai menjadi lebih mandiri dalam membuat keputusan tanpa harus bergantung pada partai lain. Selain itu partai-partai lebih teratata dalam membangun kaderisasinya hingga pada akhirnya membawa pada perbaikan kedudukan kaderisasi. Regulasi semacam itu juga akan menguatkan peran ideologi. Selain itu, partai juga akan terbiasa dengan proses yang melibatkan lebih banyak elemen sehingga nuansa demokrasi internal menjadi lebih terjaga dan partai bukan alat kepentingan segelintir orang. Pada akhirnya berbagai regulasi semacam itu mendukung upaya peningkatan kualitas kader, karena kaderisasi berjalan sebagaimana harusnya dan kader yang berniat menjadi kandidat kepala daerah akan dituntut memperhitungkan penilaian/evaluasi lebih banyak orang lagi.

Terkait dengan pilkada, pembenahan regulasi dalam setidaknya tiga hal tersebut berpotensi menyebabkan beberapa kebaikan. Dengan tidak adanya PT maka kemandirian partai dapat terjaga, misalnya, dengan diperbolehkan mencalonkan kandidatnya sendiri tanpa harus membangun koalisi dengan partai manapun. Situasi ini cenderung mengurangi politik dagang sapi yang biasanya muncul pra-kandidasi. Tidak itu saja, idealisme atau kepentingan ideologis partai juga akan lebih terjaga. Peluang kebebasan melakukan kandidasi ini juga akan memotivasi partai dan kadernya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi kepala daerah dan bukan semata menjadi pendukung kader partai lain.

Selain itu berjalannya kaderisasi akan menyebabkan terutama proses kaderisasi internal sebagai patokan penentuan kandidasi. Kaderisasi akhirnya menjadi aktifitas yang menentukan bukan sekadar ada. Kondisi ini pada akhirnya akan membuka lebat peluang bagi ketua DPD/ DPW (yang seharusnya adalah kader partai yang paling berkualitas) menjadi kandidat terkuat sebagai calon kepala daerah. Sehubungan dengan terbukanya masukan masyarakat melalui uji public, maka akan semakin terbukan peluang bagi banyak elemen dalam menentukan nasib seorang kandidat. Proses kandidasi yang transparan ini tentu saja akan lebih aspiratif dan menghasilkan kandidat yang dikenal baik kualitas dan komitmennya.

Penutup

Pelaksanaan pilkada serentak yang telah dilakukan sejak 2015 telah menghasilkan berbagai fenomena yang diantaranya berdampak positif, seperti keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses ini. Namun demikian pelaksanaan itu tidak seutuhnya berjalan sempurna. Dari hasil kajian atas pelaksanaan pilkada di empat wilayah di Pulau Jawa di atas terlihat bahwa di antara banyak kelemahan yang ada adalah pelaksanaan pilkada menunjukan masih lemahnya pelembagaan partai. Tidak itu saja pelaksanaan pilkada justru cenderung menguatkan pragmatisme ketimbang idealisme apalagi ideologis. Artikel ini menyarankan sebuah pembenahan yang mutlidimensi untuk mengatasai kelemahan-kelemahan itu. Tentu saja saran tersebut bersifat relatif. Namun dengan menjalankannya dapatlah diharapkan bahwa pada gilirannya bahwa kualitas pilkada akan membaik dan peran partai dalam ajang pilkada dapat lebih besar lagi.

Secara umum pada akhirnya perlu disadari bahwa pelaksanaan pilkada adalah dalam rangka mencari sosok kepala daerah yang bertugas membentuk pemerintahan. Sosok ini jelas harus seorang yang terbaik, yang memiliki ketajaman visi, memiliki sikap kepemimpinan dan membumi serta mendapat dukungan kuat di akar rumput. Seorang yang dapat mempersembahkan dampak-dampak besar sekaligus, sebagaimana dikatakan Mughan dan Petterson[27], mampu menggerakan masyarakat melalui persuasi yang menggugah guna meraih tujuan bersama. Itu semua pada dasarnya dapat saja terjadi jika memang kita semua mampu meningkatkan kualitas pilkada dan partai politik sebagai kontestan di dalamnya.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal

Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel. Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustaan Populer Gramedia, 2009.

Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1978.

Crouch, Colin. *Post-Democracy*. Cambridge: Polity Press, 2004.

Ford, M dan Pepinsky, T B, (eds). *Beyond Oligarchy. Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2014.

Hermansson, Jorgen. *The Personalization of Party Politics: The Voters Perspectives*. Unpublished manuscript. Uppsala: Dept. of Government, Uppsala University, 2011.

Heywood, Andrew. *Political Ideologies: An Introduction*. Hampshire and London, the Macmillan Press Ltd, 1992.

Junaidi, Veri, dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik. Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011.

Katz, Richard and Mair, Peter. *How Party Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies*. London: Sage Publication, 1994.

Mietzner, M. *Money, Power, and Ideology. Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: ASAA Southeast Asia Publication Series, 2013.

Mughan, Anthony dan Petterson, Samue C. *Political Leadership in Democratic Societies*. Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1992.

[27] Anthony Mughan dan Samuel C. Petterson, *Political Leadership in Democratic Societies*, (Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1992), hlm. 11.

Noor, Firman. *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam: Studi Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*. Jakarta: LIPI Press, 2015.

Ikrar N. Bhakti, (ed), *Evaluasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Jakarta: ERI, LIPI dan AEC, 2015.

Noor, Firman. "The Phenomenon of Post-Democracy Party", *Jurnal Penelitian Politik,* Vol.14, No.2 (2017).

Notosusanto, Smita, "Analisa AD/ART Partai Politik*"*, makalah seminar, tidak dipublikasikan dalam *http://forum-politisi.org/downloads/Analisa_AD_ART_Parpol_-_Smita.pdf.* (2005).

Haris, Syamsuddin, ed,. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia, LIPI and IMD, 2004.

Randall, Vicky dan Svasand, Lars. "Party Instutitionalization in New Democracies", *Party Politics*, Vol. 8, 1 (Januari 2002) .

Robison, Richard dan Hadiz, Vedi .R. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Rouledge Curzon 2004.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.

Supriyanto, D dan Wulandari, L. *Bantuan Keuangan Partai Politik.* Jakarta: Yayasan Perludem, 2012.

Tomsa, Dirk. *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The Post Soeharto Era*. New York: Routledge, 2008.

Ufen, Andreas. "Political Party and Party System Institutionalization in South East Asia: A Comparison of Indonesia, The Philippines and Thailand". *GIGA Working Papers 44/2007*, (March 2017).

Ufen, Andreas. "Party presidentialization in post-Suahrto Indonesia", dalam *Contemporary Politics*, Volume 24, Issue 3 (2018).

Ford, Michele and Pepinsky, Thomas B. *Beyond Oligarchy. Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2014.

Sumber Online

Redaksi. "Sudirman Said: Relawan Kami Kerja Luar Biasa", 28 Juni 2018, dalam https://regional.kompas.com/read/2018/06/28/08562251/sudirman-said-relawan-kami-kerja-luar-biasa.

Redaksi. "Politik Hasil Kukurusukan, Pasangan Asyik Klaim Relawan di Jabar Bertambah", dalam https://m.merdeka.com/politik/hasil-kukurusukan-pasangan-asyik-klaim-relawan-di-jabar-bertambah.html.

Redaksi. "Rano Karno Nilai Strategis Peran Relawan di Pilgub Banten 2017", dalam https://www.liputan 6.com/pilkada/read/rano-karno-nilai-strategis-peran-relawan-di-pilgub-banten-2017.

Rmol. "PKS: Relawan Anies-Sandi Luar Biasa", 15 Februari 2017, dalam https://rmol.co/amp/2017/02/15/280611/PKS:-Relawan-Anies-Sandi-Luar-Biasa Rudi, Alsadada. "Mengapa Fraksi Gerindra sangat Benci Ahok", dalam https://megapolitan.kompas.com.

Redaksi. "Alasan PKB Batal Usung Ganjar-Taj Yasin di Pilkada Jateng", dalam https://tirto.id/ alasan-pkb-batal-usung-ganjar-taj-yasin-di-pilkada-jateng.

Redaksi. "Jalan Panjang PDIP Munculkan Puti Guntur Soekarno", dalam htpps://m.viva.co.id/amp/berita/politik/995398-jalan-panjang-pdip-munculkan-puti-guntur-soekarno.

Redaksi, "Pengamat: Dukung Khofifah Cagub Jati, Demokrat Untung di Pilpres 2019", 21 Maret 2018, dalam www.liputan6.com.

Tribunnews, "Survei Populi: Pemilih PKB Lebih Pilih Khofifah-Emil", 4 Mei 2018, dalam www.tribunnews.com.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Agus Sutisna

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamamdiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang kepemiluan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: tisna_1965@ymail.com.

Firman Noor

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: firman.noor@yahoo.co.id.

Idil Akbar

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: idil.akbar@gmail.com

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: kurniawati.dewi@yahoo.com.

Lili Romli

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajan yang diminati penulis adalah tentang kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: liliromli.lipi@gmail.com

M. Fajar Shodiq Ramadlan

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaiakn pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang kepemiluan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: fajarramadlan@ub.ac.id.

Moch Nurhasim

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai poitik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza K.D Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Romel Masykuri

Penulis merupakan mahasiswaprogram magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: romel.masykuri@gmail.com

Ridho Imawan Hanafi

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel ridhoimawan@gmail.com.

Sri Budi Eko Wardani

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: sbe_wardani@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia, Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, Beranda Perdamaian, Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Kajian kepolisian di antaranya: Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal; Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang, Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku; Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas; Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.
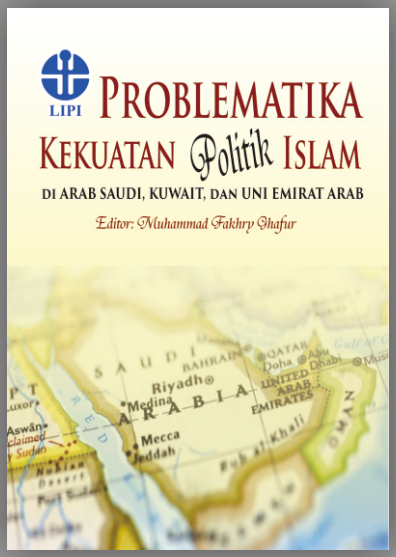
Informasi
Hasil Penelitian Terpilih